

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi (2015), meneliti tentang Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GDP dan Inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, sedangkan FDR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel yang digunakan yaitu NPF sebagai variabel dependen, GDP dan Inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian yang akan dilakukan menggunakan model VAR atau VECM untuk mengetahui pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek.

2. Dinnul Alfian Akbar (2016), meneliti tentang Pengaruh Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF, GDP berpengaruh negatif terhadap NPF, CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Secara simultan

bersama-sama variabel-variabel independen tersebut berpengaruh terhadap NPF.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel yang digunakan yaitu NPF sebagai variabel dependen, GDP dan Inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan model VAR atau VECM untuk mengetahui pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek.

3. Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego (2011), meneliti tentang Pengaruh variabel makro dan mikro terhadap NPL perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil analisis IRF, NPF BS merespon positif terhadap guncangan variabel IPI dan CAR serta merespon negatif terhadap guncangan variabel Kurs, inflasi, SBIS, dan FDR.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel penelitian yaitu NPF sebagai variabel dependen, Kurs dan inflasi sebagai variabel independen, selain itu dari metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan model VAR. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan dilakukan, model VAR akan digunakan jika tidak terdapat kointegrasi, jika terdapat kointegrasi maka model VECM yang akan digunakan, selain itu langkah-langkah yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan akan lebih diperjelas.

4. Ach. Yasin (2014), meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Inflasi, Rasio Pembiayaan Bagi terhadap Total Pembiayaan, dan *Margin Murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap NPF. Sedangkan FDR tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPF. GDP dan Rasio Pembiayaan Bagi Hasil MMR berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan Inflasi dan *Margin Murabahah* (MM) berpengaruh positif terhadap NPF.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel yang digunakan yaitu NPF sebagai variabel dependen, GDP dan Inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan model VAR atau VECM untuk mengetahui pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek.

5. Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012), meneliti tentang analisis eksternal dan internal dalam menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GDP riil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. Rasio alokasi

pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap NPF

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel yang digunakan yaitu NPF sebagai variabel dependen, GDP dan Inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan model VAR atau VECM untuk mengetahui pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek.

Secara keseluruhan dari penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat ketidak samaan pada hasil yang variabel independennya sama. Sehingga peneliti kali ini akan lebih memperdalam dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad, Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW.⁵ Dengan kata lain, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan

⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm 93-94.

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Perbankan syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip muamalah untuk menghindari sistem bunga. Al Qur'an dan Hadits menjadi pedoman bagi bank syariah, sehingga bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.

Bank syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, isinya mengenai sebuah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi perbankan konvensional untuk membuka cabang yang operasionalnya dengan sistem syariah yang disebut Unit Usaha Syariah, dan dapat pula mengkonversikan dirinya secara total menjadi Bank Umum Syariah.

Perbedaan mendasar bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem operasional dan produk yang dikembangkan. Dalam bank konvensional sistem bunga digunakan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan dalam bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Bank syariah juga menggunakan sistem *partnership* dalam menjaga hubungannya

dengan nasabah, sehingga bank syariah menganggap nasabah sebagai mitra.

Di Indonesia, bank syariah juga berperan dalam perekonomian, yaitu ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usahanya seperti pembiayaan yang berlandaskan pada syariat Islam. Diharapkan bank syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan dalam berbagai bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

b. Pembiayaan Bank Syariah

Salah satu kegiatan bank syariah adalah penyaluran dana kepada mitra atau nasabah yang membutuhkan dana. Dalam perbankan syariah kegiatan tersebut disebut pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun nonbank bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara, dan kontijensi pada rekening administrasi serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.⁶

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 196.

Perbedaan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga yang telah ditetapkan, sedangkan pada bank syariah, keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau dari imbalan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pada saat akad.⁷

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan tersebut. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan berdampak pada profitabilitas dari kinerja bank syariah.⁸

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, hlm. 73

⁸ Muntoha Ihsan, "Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010", dalam http://eprints.undip.ac.id/26640/1/artikel_skripsi_muntoha_ihsan.pdf, diakses pada 17 September 2016

kepada nasabah sebagai pemilik dana. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua hal yaitu hukum dan kepercayaan. Bank dapat melaksanakan kegiatan dan mengembangkan usahanya jika nasabah percaya untuk menempatkan usahanya di bank syariah. Setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁹ Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang relatif besar, apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank syariah yang bersangkutan dan dapat menimbulkan *rush*.¹⁰

Status NPF pada prinsipnya didasarkan kepada ketepatan waktu bagi nasabah dalam pengembalian atau membayar kewajiban berupa bagi hasil maupun pokok pinjaman. Tingginya rasio NPF dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan yang baik, maupun dalam hal pengelolaan pembiayaan, termasuk juga dalam hal

⁹ Yunis Rahmawula. "Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia", dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117210T%2024558%20perbandingan%20faktoranalisis.pdf>, diakses pada 20 Februari 2017

¹⁰ Muntoha Ihsan. "Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010", dalam http://eprints.undip.ac.id/26640/1/artikel_skripsi_muntoha_ihsan.pdf, diakses pada 17 September 2016

pemantauan setelah pembiayaan disalurkan, dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi gagal bayar.¹¹

Bagi bank syariah, rasio NPF sangat diperhatikan, karena sumber pendapatan bank terbesar diperoleh dari pemberian pembiayaan untuk bisnis usaha. Selain sebagai sumber utama pendapatan bank, pembiayaan juga sebagai kontributor utama yang dapat menyebabkan kondisi bank menjadi buruk, sebab risiko paling tinggi berasal dari pembiayaan. Karena nilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar, dapat menyebabkan modal bank berkurang sangat cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah dari besarnya rasio *Non Performing Financing* (NPF).

b. Penilaian Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Peraturan No.9/9/PBI/2007, kualitas pembiayaan dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kriteria kolektabilitas tergantung pada prospek usaha nasabah. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF maksimal sebesar 5%. Jika melebihi 5% akan mengurangi angka penilaian tingkat kesehatan bank, yang akan mengakibatkan tingkat kesehatan bank menjadi

¹¹ Ahmad Tabrizi. "Analisis Pengaruh Variabel Makro terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2013, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27195/1/AHMAD%20TABRIZI-FEB.pdf>, diakses pada 20 Februari 2017

menurun. Agar tingkat kesehatan bank tetap baik, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu bank harus memelihara tingkat rasio NPF agar tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel 2.1 Persamaan *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio	Keterangan
$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{TotalPembiayaan}} \times 100$	<p>Tujuan:</p> <p>Mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh Bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan Bank Syariah semakin buruk.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan komponen Pembiayaan dan kolektabilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	

Sumber: Peraturan Kodifikasi Bank, Bank Indonesia, 2017

Non Performing Financing (NPF) terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Pembiayaan bermasalah juga tidak dapat dihindari oleh pihak bank,

tetapi hanya bisa diminimalisir dengan menerapkan sistem kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah.

c. Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

Upaya awal dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah, bank dapat melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah sebagai upaya pembinaan sebelum memasuki langkah penyelamatan. Pembinaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah yang bermasalah dalam pelunasan pembiayaan. Pembinaan bertujuan untuk mencari tahu permasalahan pembiayaan yang timbul apakah karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan oleh nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.

Dari pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan nasabah mana yang akan mendapatkan penyelamatan terhadap fasilitas pembiayaannya dan nasabah mana yang harus mendapatkan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh bank syariah terhadap nasabah yang mengalami masalah untuk memperbaiki kinerja usahanya dan kualitas pembiayaannya berdasarkan atas hasil analisis bank, nasabah tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melunasi kewajibannya kepada bank.

1) Analisis pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:¹²

a) Melakukan analisis sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal, berikut:

(1) Aspek Internal

- (a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- (b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- (c) Laporan keuangan tidak lengkap
- (d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- (e) Perencanaan yang kurang matang
- (f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

(2) Aspek eksternal

- (a) Pasar kurang mendukung
- (b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- (c) Kebijakan pemerintah
- (d) Pengaruh lain di luar usaha
- (e) Kenakalan peminjam

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm: 168-170

b) Kedua, menggali potensi peminjam

Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- (1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- (2) Adakah peminjam memiliki usaha lain?
- (3) Adakah penghasilan lain peminjam?

Selain itu ada tindakan yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyelamatan pembiayaan, yaitu:

(1) *Reschedule*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* (3R)

(a) *Reschedule* adalah memperkecil angsuran dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayaran

(b) *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya perubahan jadwal angsuran, pemberian potongan, dan lain sebagainya tergantung kebijakan bank yang bersangkutan.

(c) *Restructuring* adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, serta konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah.

2) Penyitaan barang jaminan pembiayaan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan penalty atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al qardhul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti:

a) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan

- b) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya
- c) Menekan: tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan

Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk

- a) Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai uang dijaminan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi

- b) Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana bank terdiri dari, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang dapat diperoleh melalui pasar uang serta dana pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar.¹³

Kemudian Adiwarmanto A. Karim menyebutkan “Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*”.¹⁴

Pengertian sumber dana pihak ketiga menurut Kasmir yaitu ”Sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini”. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan.¹⁵

¹³ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 3, 2006) hlm. 65

¹⁴ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2003) hlm 107

¹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002), hlm: 63

Dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

b. Sumber Dana Pihak Ketiga

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dihimpun dalam bentuk:

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶ Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang untuk melakukan transaksi, tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas. Selain itu bila dibandingkan dengan giro atau deposito, peranan tabungan dalam komposisi sumber dana perbankan relatif lebih kecil. Tingkat fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat kecil dan tidak selabil dana yang bersumber dari giro.¹⁷

¹⁶ Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 26

¹⁷ Azhari Norman, "Analisis Pengaruh *Financing Deepening* pada Sektor Perbankan dan Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Fakultas Ekonomi, UI, 2010, hlm. 43, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/134229-T%2027921-Analisis%20pengaruh-Metodologi.pdf> pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 4.25

Dalam perbankan syariah, tabungan memiliki dua akad, yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Dalam Tabungan *wadiah*, nasabah tidak mendapat keuntungan karena sifat dari tabungan ini adalah titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Tetapi bank diperbolehkan memberikan bonus. Sedangkan dalam tabungan *mudharabah*, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari dana yang digunakan untuk pembiayaan karena dalam tabungan ini mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah* yang menggunakan bagi hasil.

2) Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (pihak ketiga) dengan bank yang bersangkutan.¹⁸ Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan.¹⁹ Sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap dibank karena para pemegangnya (deposan)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ratu Ayomi Sinar Sandyo, "Analisis Hubungan Struktur Modal Dengan Profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk", Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, 2012, hlm. 8 diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/56206/8/H12ras.pdf>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 4.39

tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo bila depositan tidak ingin memperpanjang jangka waktu simpanannya, maka dananya dapat ditarik kembali.²⁰

Dalam perbankan syariah, deposito menggunakan akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan ini, nasabah sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana nasabah yang diinvestasikan kepada bank syariah dengan mendapat bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad pembukaan rekening.

3) Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan cara pemindah bukuan.²¹

Giro yang dibenarkan menurut syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

²⁰ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 58

²¹ .Azhari Norman, "Analisis Pengaruh *Financing Deepening* pada Sektor Perbankan dan Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Fakultas Ekonomi, UI, 2010, hlm. 43, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/134229-T%2027921-Analisis%20pengaruh-Metodologi.pdf> pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 4.25

4. *Gross Domestic Product (GDP)*

a. *Pengertian Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (GDP) dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan dari *Gross Domestic Product (GDP)* adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. *Gross Domestic Product (GDP)* dapat dinilai sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan dapat juga dilihat sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Oleh karena itu, GDP dianggap sebagai cerminan dari kinerja ekonomi.²²

Gross Domestic Product (GDP) atau lebih dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai akhir barang dan jasa berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Komponen di dalam GDP yaitu pendapatan, pengeluaran atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor – impor.

Gross Domestic Product (GDP) merupakan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah negara yang bersangkutan (termasuk yang dihasilkan oleh

²² Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, hlm: 17.

warga asing yang ada di negara tersebut) dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu satu tahun.

Ahmad Tabrizi menjelaskan bahwa GDP adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. GDP atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang GDP atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.²³

Dapat disimpulkan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan jumlah dari semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang komponennya terdiri dari pendapatan, pengeluaran atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor pada kurun waktu tertentu.

²³ Ahmad Tabrizi. "Analisis Pengaruh Variabel Makro terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2013, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27195/1/AHMAD%20TABRIZI-FEB.pdf>, diakses pada 20 Februari 2017

b. Menghitung *Gross Domestic Product* (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) dapat dihitung menggunakan dua harga yaitu: ²⁴

- 1) GDP rill, yaitu nilai barang dan jasanya diukur menggunakan harga konstan. GDP rill akan menunjukkan apa yang terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak.
- 2) GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasanya diukur menggunakan harga yang berlaku.

Dari GDP rill dan GDP nominal dapat menghitung statistic ketiga yaitu: deflator GDP. Deflator GDP disebut juga dengan deflator harga implicit untuk GDP, dan didefinisikan sebagai rasio GDP nominal terhadap GDP rill.

$$\text{Deflator GDP} = \frac{\text{GDP Nominal}}{\text{GDP Rill}}$$

Deflator GDP mencerminkan apa yang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian.

²⁴ Mankiw, *Makroekonomi*, hlm 22-23

c. Metode Perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP)

Perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP) secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:²⁵

1) Pendekatan Produksi (*Output Approach*)

Menurut pendekatan ini, GDP adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Menurut pendekatan produksi, dalam perhitungan GDP yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input.

2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan melihat nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Jadi untuk memproduksi output dibutuhkan input faktor produksi berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Faktor-faktor produksi tersebut kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mempunyai kemampuan

²⁵ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, hlm 22-23.

mengkombinasi faktor-faktor produksi tersebut disebut pengusaha.

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah gaji atau upah. Untuk barang modal, balas jasa berupa pendapatan sewa. Untuk pemilik uang, balas jasa berupa bunga. Sedangkan untuk pengusaha berupa keuntungan. Dalam pendekatan ini, GDP mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini, GDP merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Nilai GDP berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah nilai total dari lima jenis pengeluaran, yaitu:

$$\mathbf{GDP = C+G+I+(X-I)}$$

5. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Laju inflasi merupakan fenomena ekonomi yang lazim terjadi pada suatu perekonomian. Inflasi akan menjadi masalah ekonomi yang serius apabila terjadi pada jangka waktu yang panjang dan berada di level yang tinggi. Secara teoritis, inflasi artinya meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi, kenaikan harga yang terjadi pada sekelompok kecil barang

belum bisa disebut inflasi. Demikian juga perubahan harga yang terjadi sekali, belum bisa disebut inflasi.²⁶

Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Menurut para ekonom modern, inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas dan jasa, maka disebut deflasi.²⁷

Kenaikan harga dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), dan GNP deflator.²⁸ Indeks harga konsumen merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam periode tertentu. Angka Indeks Harga Konsumen atau IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu.

IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, dan Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB melihat inflasi dari sisi produsen.

²⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta, Indeks), hlm: 74

²⁷ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo), hlm: 136

²⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku II*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), hlm: 25.

IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produsen.

b. Jenis-Jenis Inflasi

Ada beberapa jenis inflasi, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya, besarnya laju inflasi, sumber asalnya dan berdasarkan faktor penyebab.²⁹

1) Inflasi menurut sifatnya

Sifat perubahan inflasi berbeda-beda tergantung dari faktor yang mempengaruhinya.

a) Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Merupakan inflasi yang ditandai dengan laju yang relative rendah, yaitu kurang dari 10% per tahun. Inflasi berjalan lamban dan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Inflasi merayap tidak memberikan pengaruh yang berarti pada perekonomian.

b) Inflasi Menengah (*galloping inflation*)

Inflasi ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cukup besar, biasanya antara dua digit atau di atas 10%. Sifat inflasi ini berjalan dalam tempo yang singkat dan berdampak akseleratif dan akumulatif, artinya inflasi bergerak dengan laju yang semakin besar. Pengaruh terhadap ekonomi relatif

²⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm: 74-75

cukup berat dibanding inflasi merayap, karena akan membebani masyarakat yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan karyawan kontrak.

c) Inflasi Tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang memiliki tingkat yang tinggi dan menimbulkan efek merusak perekonomian karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Harga barang akan naik berlipat-lipat dalam jangka waktu yang pendek. Inflasi tinggi timbul pada saat terjadi defisit anggaran untuk membayar proyek-proyek yang bersifat darurat dan ditutup melalui kebijakan pencetakan uang.

2) Inflasi menurut Besarnya

a) Inflasi Rendah

Inflasi dengan laju kurang dari 10% pertahun. Sifat inflasi rendah sama seperti inflasi merayap, dan tidak memberikan dampak yang merusak pada perekonomian. Dalam beberapa hal inflasi rendah ini memberi dorongan bagi pengusaha untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan produksi karena adanya kenaikan harga barang di pasar.

b) Inflasi Sedang

Inflasi ini bergerak antara 10%-30% pertahun. Pengaruh yang ditimbulkan cukup dirasakan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap.

c) Inflasi Tinggi

Inflasi ini memiliki laju antara 30%-100% pertahun. Inflasi yang tinggi terjadi ketika keadaan politik yang tidak stabil dan menghadapi krisis yang berkepanjangan. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ekonomi masyarakat seperti perbankan. Aktivitas kredit, asuransi, proses produksi dan distribusi barang akan mengalami guncangan, karena masyarakat lebih memilih sikap aman dengan memegang barang daripada uang. Masyarakat juga akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas nilai mata uang.

d) Hyper Inflasi

Inflasi dengan laju di atas 100% pertahun dan menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Inflasi ini biasanya menandai adanya pergolakan politik dan pergantian pemerintahan. Masyarakat benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang beredar hingga menyebabkan perekonomian lumpuh.

3) Inflasi menurut Sebabnya

a) Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sementara produksi telah berada pada kondisi *full employment*. *Demand pull inflation* timbul jika peningkatan permintaan agregat bergerak lebih besar dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Sehingga untuk menstabilkan harga harus diimbangi dengan kebijakan mendorong produksi sektor riil. *Demand pull inflation* terjadi pada perekonomian yang mendekati *full employment* artinya pengangguran menurun dan tenaga kerja langka.

b) Inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini diakibatkan oleh meningkatnya biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif. Inflasi ini diawali dengan meningkatnya upah yang merupakan komponen utama dalam aktivitas produksi.

c. Dampak dari Inflasi

Inflasi memiliki dampak terhadap masyarakat dan perekonomian, antara lain: ³⁰

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama non-primer dan barang-barang mewah.
- 4) Mengarahkan investasi kepada hal-hal yang non produktif, yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, dengan mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri dan lain sebagainya.

6. Kurs

a. Pengertian Kurs

Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestic yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar (Kurs) menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. ³¹ Kurs dibedakan

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 139.

³¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm: 397.

menjadi dua, yaitu 1) Kurs nominal, adalah harga relative dari mata uang di antara dua negara dan 2) Kurs rill, yaitu harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Kurs rill menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.³²

b. Faktor yang mempengaruhi Kurs

Perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh:³³

1) Perubahan citarasa masyarakat

Cita rasa masyarakat akan mempengaruhi corak konsumsi mereka. Perubahan citarasa akan mengubah corak konsumsi atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun dari impor. Perbaikan kualitas produk dalam negeri akan mengurangi impor dan akan menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas impor akan menyebabkan keinginan masyarakat terhadap barang-barang impor bertambah. Perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran akan valuta asing

2) Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan apakah barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang apabila dijual dengan harga murah

³² Mankiw, *Makroekonomi Edisi Enam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm: 128

³³ *Ibid*, hlm: 402-403

akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspor akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor dan sebaliknya, kelebihan harga barang akan mengurangi impor.

3) Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing. Kecenderungan tersebut disebabkan efek inflasi yang menyebabkan harga-harga dalam negeri lebih mahal daripada harga-harga di luar negeri, dan karena itu inflasi akan menambah impor yang menyebabkan permintaan atas valas akan bertambah. Inflasi juga menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal, karena inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan penawaran valas berkurang. Maka harga valas akan bertambah

4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri mengalir ke dalam negeri. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga

dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain

5) Pertumbuhan ekonomi

Efek yang ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uangnya tergantung pada karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila perkembangan tersebut diakibatkan oleh ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah dan akan menaikkan nilai mata uangnya. Tetapi apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor bertambah, maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah daripada permintaannya dan akan menurunkan nilai mata uang tersebut.

c. Sistem Nilai Tukar (Kurs) ³⁴

1) Sistem Kurs Tetap (*fixed exchange rate*)

Nilai tukar mata uang suatu negara ditetapkan pada suatu nilai konstan atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batasan sempit. Dalam sistem ini, pemerintah mengintervensi nilai tukar agar selalu berada dalam batas yang ditentukan. Pemerintah dapat melakukan devaluasi maupun revaluasi.

2) Sistem Kurs Bebas/Mengambang (*free floating exchange rate*).

Dalam sistem ini, besarnya nilai kurs tukar diserahkan kepada

³⁴ Angga Dwi Putra, "Efek Neraca dan Efek Suku Bunga di Indonesia: Analisis Terhadap Perusahaan Berorientasi Ekspor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2008", Fakultas Ekonomi, UI, 2009, hlm. 33

mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri. Dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

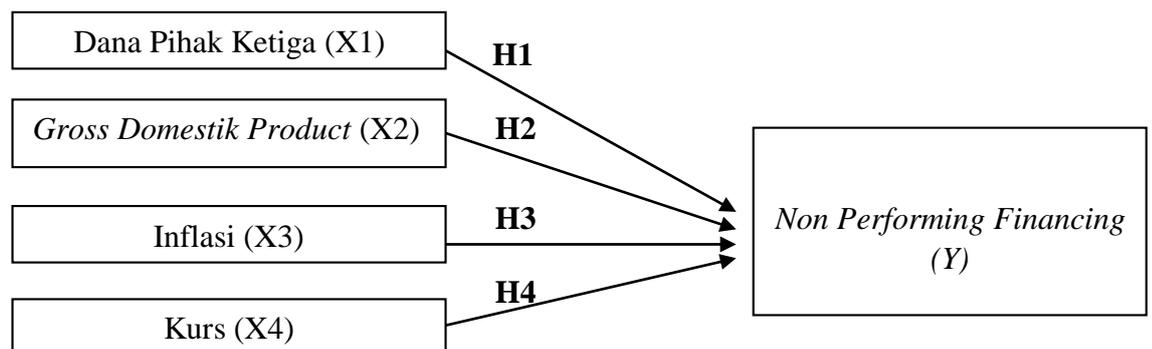
3) Sistem Kurs mengambang Terkendali (*Managed Floating Rate*)

Merupakan gabungan dari dua sistem diatas. Nilai kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, namun pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah turun tangan melakukan intervensi saat harga mencapai batas-batas tertentu, misalkan 5% diatas atau dibawah kurs keseimbangan.

4) *Pegged exchange rate*

Nilai tukar mata uang dipatok (*pegged*) dengan mata uang lain. Ketika nilai mata uang yang dijadikan patokan berfluktuasi, mata uang domestik juga ikut berfluktuasi dengan besaran yang sama.

C. Kerangka Berfikir Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang akan digunakan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi dan kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia adalah:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi pula penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya. Hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan, alhasil pengembalian pembiayaan tidak lancar yang

berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Dengan demikian Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam bank syariah, bagi hasil DPK merupakan refleksi langsung pendapatan pembiayaan sehingga merupakan refleksi tidak langsung kualitas pembiayaan.

H1 : jumlah DPK mempunyai pengaruh negatif terhadap rasio NPF perbankan syariah.

2. Pengaruh *Gross Domestic Product (GDP)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

Secara teori GDP mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian dan pengeluaran total terhadap output barang dan jasa perekonomian. Output barang dan jasa suatu perekonomian bergantung pada jumlah input yaitu faktor-faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output. Faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Suatu perusahaan menggunakan tenaga kerja dan modal dalam jumlah yang akan memaksimalkan laba. Untuk mendapatkan modal, sebagian perusahaan melakukan pembiayaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang maksimal. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan perusahaan akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Di sisi lain, ketika perusahaan mendapatkan pendapatan yang maksimal, tenaga kerja yang merupakan faktor produksi akan mendapat gaji sesuai kontribusi

marginal dalam proses produksi. Dengan pendapatan yang tinggi, perusahaan maupun pekerja yang mempunyai kewajiban pengembalian di bank dapat mengembalikan pinjaman dana tepat waktu, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

H2 : GDP berpengaruh negatif terhadap rasio NPF perbankan syariah

3. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja bukan termasuk inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut menyebabkan kenaikan pada barang lainnya. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Kenaikan ini dapat memberi tekanan pada ekonomi masyarakat terutama yang menjadi nasabah perbankan.

Jika inflasi terjadi pada saat pendapatan masyarakat tetap atau menurun, maka hal ini dapat memperparah risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah, sebab kemampuan pengembalian pembiayaan oleh nasabah ikut menurun. Sebelum inflasi terjadi, seorang nasabah sanggup membayar angsuran. Namun ketika terjadi inflasi yang menyebabkan harga-harga naik, sedangkan pendapatan

tetap, menyebabkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran menjadi turun karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka peningkatan inflasi dapat meningkatkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.

H3 : Inflasi berpengaruh positif terhadap rasio NPF perbankan syariah

4. Pengaruh Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Nilai tukar atau kurs diartikan sebagai nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Dalam penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi antar negara terutama yang bergerak disektor ekspor-impor.

Naik turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan pembiayaan impor yang kemudian meningkatkan biaya produksi. Depresiasi merupakan kondisi dimana nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan (nilai rupiah semakin tinggi terhadap dolar Amerika) yang disebabkan oleh mekanisme perdagangan. Adanya pelemahan nilai mata uang rupiah ini dapat berpengaruh pula pada penurunan pendapatan.

Ketika depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terjadi, akan muncul kemungkinan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank syariah. Posisi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, terutama pada kondisi pelemahan nilai mata uang rupiah, harus dikendalikan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

H4 : Kurs berpengaruh positif terhadap rasio NPF perbankan syariah.